

**KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA
KLATEN DAN KESESUAIANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW)**



**Disusun sebagai salah satu syarat
menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Geografi Fakultas Geografi**

Oleh :

KRISNA AMANDA PUTRI

E100181054

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA
KLATEN DAN KESESUAIANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

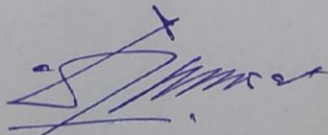
KRISNA AMANDA PUTRI

E100181054

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Agus Anggoro Sigit, S.Si., M.Sc.

NIK. 867

HALAMAN PENGESAHAN

**KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA
KLATEN DAN KESESUAIANNYA DENGAN RENCANA
TATA RUANG WILAYAH (RTRW)**

OLEH

Krisna Amanda Putri

E100181054

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Geografi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 4 November 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Pembimbing : Agus Anggoro Sigit, S.Si., M.Sc. (.....)

(Ketua Dewan Penguji)

Pembahas 1 : Aditya Saputra, Ph. D. (.....)

(Anggota I Dewan Penguji)

Pembahas 2 : Danardono, S. Si., M. Sc. (.....)

(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,

Dr. Yuli Priyana, M.Si.

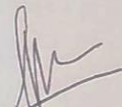
NIK. 573

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 November 2020



Krisna Amanda Putri

E100181054

KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA KLATEN DAN KESESUAIANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Abstrak

Analisis ketersediaan RTH publik di Kota Klaten dilakukan karena melihat terus terjadinya pembangunan baik menggunakan lahan milik pribadi maupun lahan yang sebelumnya difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Analisis ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) Publik dapat dilakukan dengan memanfaatkan citra Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Penelitian ini memanfaatkan citra SPOT 7 guna mendeteksi dan digitasi objek RTH publik di Kota Klaten. Ketersediaan RTH publik disuatu wilayah harus diperhatikan untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakatnya. Ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Klaten telah diatur dalam RTRW guna mencapai pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui agihan dan ketersediaan (luas) RTH publik di Kota Klaten, serta analisis keterkaitan RTH publik dengan RTRW Kota Klaten. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Citra SPOT 7 Kota Klaten yang telah dilakukan *georeferencing* serta peta RTRW Kota Klaten tahun 2018. Citra digunakan untuk melakukan interpretasi objek RTH publik di Kota Klaten. Berdasarkan hasil digitasi diperoleh 485 titik objek RTH publik. Hasil tersebut dilakukan perhitungan dengan rumus *Slovin, 1960* untuk menentukan jumlah titik sampel yang akan dilakukan cek lapangan dan diperoleh 41 titik sampel. Titik sampel ditentukan menyebar diseluruh objek RTH publik wilayah Kota Klaten kemudian dilakukan cek lapangan guna memvalidasi hasil digitasi yang telah dilakukan. Peta RTRW Kota Klaten digunakan sebagai pembandingan terhadap petaa RTH publik yang telah dihasilkan. Perbandingan yang dilihat yaitu apakah perencanaan pembangunan pemerintah telah sesuai dengan pembangunan yang telah terjadi hingga saat ini. Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa RTH publik di Kota Klaten terletak menyebar diseluruh Kota Klaten. Dengan luas area sebesar 3574,050 Ha Kota Klaten baru memiliki RTH publik secara keseluruhan sebesar 77, 892 Ha atau hanya $\pm 2, 19\%$ dari total wilayah Kota Klaten. Berdasarkan RTRW yang telah disah kan, lahan yang dialokasikan untuk RTH publik oleh pemerintah sebesar 227,664 Ha dan baru dimanfaatkan sebesar 77, 892 Ha. Sisa lahan sebesar 149,772 Ha penggunaannya belum sesuai dengan RTRW yang telah disah kan.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau Publik, RTRW, Kota Klaten

Abstract

Analysis of the availability of public green open space in Klaten City was carried out because it saw the continuing development of both private land and land that had previously functioned as green open space. Analysis of public green open space (RTH) data can be used by remote sensing images and geographic information systems. This research used SPOT 7 imagery to detect and digitize public green open spaces in Klaten City. Public green open space in an area must be considered to create a comfortable atmosphere for the society. The public green open space (RTH) in Klaten City has been regulated in the RTRW to achieve a balanced and sustainable development. The purpose of this research was to know distribution and data (area) of public green open space in Klaten City, and analysis to get to know about linkage public green open space and RTRW in Klaten City. The data that used in this research is SPOT 7 Image of Klaten City which has been georeferenced and map of Urban Spatial Plans (RTRW) Klaten City in 2018. The image be used to interpret public green open spaces in Klaten City. Based on the results of digitization, 485 points of public green open space were obtained. These results were calculated using the Slovin formula, 1960 to determine sample points to be checked and 41 sample points were obtained. The sample points were determined to spread across all public green open spaces in the Klaten City area, then field checks were carried out to validate the results of digitization has done. The map of RTRW Klaten City is used as a comparison to the public RTH map that has been produced. The comparison seen that the government's development planning has been in line with the development that has taken place to date. The results of the research can be known that public RTH in Klaten City is located spread throughout Klaten City. With an area of 3574,050 Ha Klaten City had an overall public RTH of 77, 892 Ha or only $\pm 2.19\%$ of the total area of Klaten City. According to RTRW that has been legalized, the land allocated to public RTH by the government amounted to 227,664 Ha and only used 77, 892 Ha. The remaining land of 149,772 Ha is not in accordance with the RTRW that has been legalized.

Keywords: *Public Green Open Space, RTRW, Klaten City*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang terbuka hijau atau RTH berdasarkan Permen PU nomor 5 tahun 2008 merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tumbuh secara alamiah atau sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau (RTH) dapat diklasifikasikan berdasarkan pada kepemilikan, fungsi, pola dan strukturnya. Berdasarkan pada pasal 29 UU Penataan Ruang, ruang terbuka hijau dibedakan berdasar pada kelas kepemilikan, dibagi menjadi RTH Pablik dan RTH Privat. Mengacu pada undang-undang nomor 26 tahun 2007 dikatakan bahwa RTH Pablik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum sedangkan RTH Privat merupakan RTH yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota, kecuali provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi. Penyediaan ruang terbuka hijau disuatu wilayah merujuk pada undang-undang No. 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau pablik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.

Dalam pengadaan atau penyediaan RTH disuatu kabupaten/kota juga harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang berlaku. RTRW merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari suatu wilayah kota. Berdasarkan undang-undang No. 26, tentang Penataan Ruang 2007, Hal tersebut merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, yang juga berisi kebijakan, tujuan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Secara lebih rinci RTRW kabupaten/kota diatur dalam Permen PU Nomor 16 Tahun 2009 tentang

pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Pengadaan atau penyediaan RTH yang mengacu pada RTRW akan menciptakan pembangunan yang seimbang dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Mengetahui pentingnya peranan RTH dalam suatu wilayah maka ketersediaan ruang terbuka hijau harus diperhatikan baik dalam tingkat provinsi, kabupaten ataupun tingkat kota, salah satunya adalah Kota Klaten yang berada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kota Klaten berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 11 Tahun 2011 terdiri atas Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan tergabung ke dalam wilayah Klaten Kota banyak mengalami pembangunan yang memanfaatkan lahan yang tersedia. Penyebab pembangunan yang terus terjadi di Kota Klaten ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk yang tinggi, luas wilayah yang sempit serta karena Kota Klaten menjadi pusat pendidikan, ekonomi maupun pemerintahan untuk Kabupaten Klaten. Kecamatan Klaten Selatan memiliki luas area 14,43 Km², Kecamatan Klaten Tengah 8,92 Km², dan Kecamatan Klaten Utara dengan luas 10,38 Km² (BPS, 2018). Akibat dari jumlah penduduk yang tinggi serta luas area yang tidak begitu besar maka menimbulkan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi, Kecamatan Klaten Selatan memiliki tingkat kepadatan penduduk 3.082 jiwa/km², Klaten Tengah 4.501 jiwa/km², dan Klaten Utara 4.564 jiwa/km² (BPS, 2018).

Pembangunan yang terjadi di Kota Klaten tidak hanya berupa rumah atau hunian serta perumahan saja, namun juga beberapa fasilitas umum. Pembangunan fasilitas umum ini ada yang memanfaatkan sawah yang masih aktif menghasilkan padi, hutan kota, ataupun tanah milik perseorangan. Seperti Gambar 1.1 berikut, perluasan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.



Gambar 1.1 Kenampakan Perluasan Gedung RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Sumber: *Google Earth.*

Pembangunan yang dilakukan dalam rangka perluasan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ini dilakukan di atas beberapa lahan sawah milik perseorangan yang telah dibeli pihak rumah sakit sebelumnya. Adapula pembangunan pasar buah yang dilakukan di atas lahan hutan kota seperti Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2 Kenampakan Perubahan Penggunaan Lahan Menjadi Pasar Buah Sungkur, Klaten.

Sumber: *Google Earth.*

Pembangunan Pasar Buah Sungkur, Kecamatan Klaten Tengah dilakukan di atas lahan yang berfungsi sebagai hutan kota. Walaupun hanya sebagian kecil hutan kota yang digunakan, tetap saja mengurangi luas hutan kota yang telah tersedia sebelumnya. Contoh berikutnya yaitu pembangunan gedung baru SMP N 2 Klaten seperti Gambar 1.3 berikut.



9 Juli 2012



10 Juli 2019

Gambar 1.3 Kenampakan Perubahan Penggunaan Lahan Menjadi Gedung SMP N 2 Klaten

Sumber: *Google Earth*.

Pembangunan SMP N 2 Klaten dilakukan pada bulan November 2011 dan selesai pada 2016 ini dilakukan atas lahan seluas 33.360 meter². Pembangunan ini dilakukan guna mendukung fasilitas belajar mengajar di mana SMP N 2 Klaten sendiri sudah menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sehingga harus menyediakan fasilitas yang lengkap pada satu lingkungan sekolah. Saat ini pihak SMP 2 Klaten juga telah membeli sawah yang berlokasi di seberangnya, sawah ini direncanakan akan digunakan sebagai akses jalan agar lebih mudah dijangkau lokasinya.

Pembangunan yang terus terjadi dan tentu menggunakan lahan yang tersedia akan mempengaruhi luas ruang terbuka hijau yang ada sebelumnya. Keberadaan ruang terbuka hijau disuatu kota cukup penting dilihat dari fungsi dan manfaat yang diberikan. Sesuai dengan pasal 3 Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan bertujuan untuk (a) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, (b) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, (c) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Melihat pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau disuatu wilayah serta adanya pembangunan yang terus terjadi maka perlu adanya pengawasan ataupun evaluasi.

Pengawasan terhadap ketersediaan RTH dapat dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem Informasi Geografis merupakan suatu jenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memasukkan, mengolah, menampilkan, memanipulasi, dan menghasilkan output informasi beserta atribut-atributnya (Prahasta, 2009). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis guna mendapatkan suatu informasi spasial maupun geografis salah satunya untuk mengetahui luasan ruang terbuka hijau yang tersedia pada suatu area serta mengetahui posisinya apakah sudah sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan. Citra resolusi tinggi dapat digunakan sebagai media guna memperoleh informasi kenampakan objek di lapangan tanpa perlu melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi. Salah satu citra resolusi tinggi yang dapat dimanfaatkan adalah citra SPOT 7.

Dalam penelitian ini hanya objek RTH publik saja yang akan dikaji dikarenakan ketersediaan data citra yang memiliki resolusi spasial tinggi, namun untuk mengkaji RTH privat seperti pekarangan rumah atau kantor serta taman pada atap bangunan akan sulit dilakukan karena objek tersebut memiliki luas area yang kemungkinan besar tidak terekam oleh citra. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Klaten Dan Kesesuaiannya Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)”**.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan didapatkan berupa:

1. Mengetahui agihan ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Klaten.
2. Mengevaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Klaten.
3. Menganalisis keterkaitan RTH publik dengan RTRW Kota Klaten.

1.3 METODE

1. Tahap Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui sebaran atau agihan RTH publik di Kota Klaten dilakukan dengan analisis dan interpretasi citra penginderaan jauh melalui kegiatan digitasi RTH publik Citra *Google earth* Kota Klaten. Klasifikasi yang digunakan dalam digitasi ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (untuk penggunaan lahan) serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 60 tahun 2014 mengenai pengendalian RTH (untuk RTH Publik). Hasil dari digitasi ini kemudian dideskripsikan secara kuantitatif serta didukung dari pengamatan secara langsung di lapangan, sehingga akan teridentifikasi persebaran RTH Publik pada tiap kecamatan di Kota Klaten.
2. Metode analisis data untuk mengetahui ketersediaan RTH publik di Kota Klaten dilakukan dengan analisis geometrik perhitungan luas RTH publik berdasarkan pada peta agihan RTH publik. Luasan RTH publik dapat diperoleh dengan memanfaatkan *tool calculate geometry* pada *ArcGis*, luasan RTH publik dapat dinyatakan dalam satuan hektar. Data luas RTH publik yang telah diperoleh dapat digunakan acuan untuk membandingkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 60 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa RTH publik pada suatu kota minimal seluas 20% dari total luas wilayahnya. Luas Kota Klaten dan RTH publik yang telah diketahui harus dirubah dalam satuan persen untuk mengetahui apakah ketersediaan RTH publik sudah sesuai dengan undang-undang.

3. Metode analisis data yang digunakan guna mengetahui apakah RTH publik di Kota Klaten letaknya sudah sesuai dengan RTRW Kota Klaten adalah dengan melakukan overlay peta agihan RTH publik dengan peta RTRW Kota Klaten. Overlay kedua data tersebut dapat menampilkan apakah lokasi RTH publik di Klaten sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dibuat oleh pemerintah setempat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

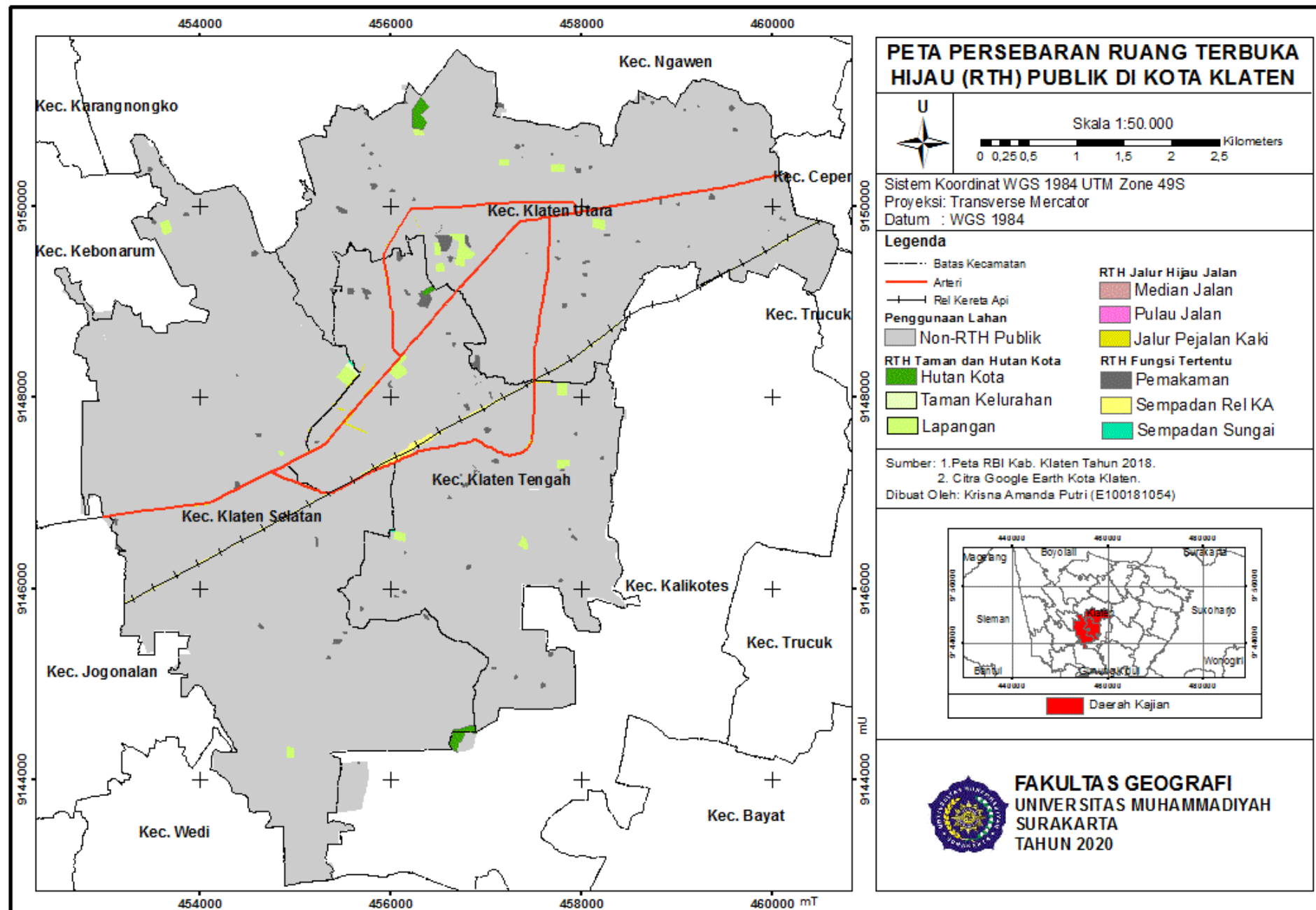
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di suatu wilayah memiliki peranan penting dan telah diatur dalam undang-undang. Ketersediaan RTH Publik di Kota Klaten mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 60 tahun 2014 mengenai pengendalian RTH. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Klaten dapat dideteksi salah satunya dengan menggunakan citra satelit seperti citra *google earth*. Objek RTH Publik dapat diperoleh dengan cara melakukan digitasi *on sceen*.

Digitasi untuk memperoleh data RTH publik di Kota Klaten diawali dengan membedakan penggunaan lahan dengan mengacu pada Permen Agraria dan Tata Ruang, untuk objek RTH publik diklasifikasikan berdasarkan pada PerGub nomor 60 Tahun 2014. Berdasarkan hasil digitasi dapat diketahui bahwa ada beberapa jenis RTH publik yang tersedia di Kota Klaten seperti hutan kota, jalur pejalan kaki, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, lapangan, median dan pulau jalan, pemakaman serta taman kelurahan. Tidak semua jenis RTH tersedia di dalam satu kecamatan yang ada di Kota Klaten.

Ruang terbuka hijau (RTH) Publik di Kota Klaten letaknya menyebar di tiga kecamatan yang ada di Kota Klaten yaitu Kecamatan Klaten Selatan, Klaten Tengah serta Klaten Utara. Kecamatan Klaten Selatan memiliki jenis RTH Publik seperti hutan kota, taman kelurahan, lapangan, jalur pejalan kaki, median jalan, pulau jalan, pemakaman, sempadan rel KA serta sempadan sungai. Kecamatan Klaten Tengah memiliki jenis RTH Publik seperti hutan kota, taman kelurahan, lapangan, olah raga dan rekreasi (Taman Kota), jalur pejalan kaki, median jalan, pulau jalan, pemakaman, sempadan rel KA serta sempadan sungai. Sedangkan Kecamatan Klaten Utara memiliki RTH Publik yang berupa hutan kota,

olah raga dan rekreasi (Taman Kota), lapangan, jalur pejalan kaki, median jalan, pemakaman, serta sempadan rel KA.

Persebaran atau Agihan Ruang Terbuka Hijau di Kota Klaten secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 4.10 Peta Agihan RTH Publik Kota Klaten.

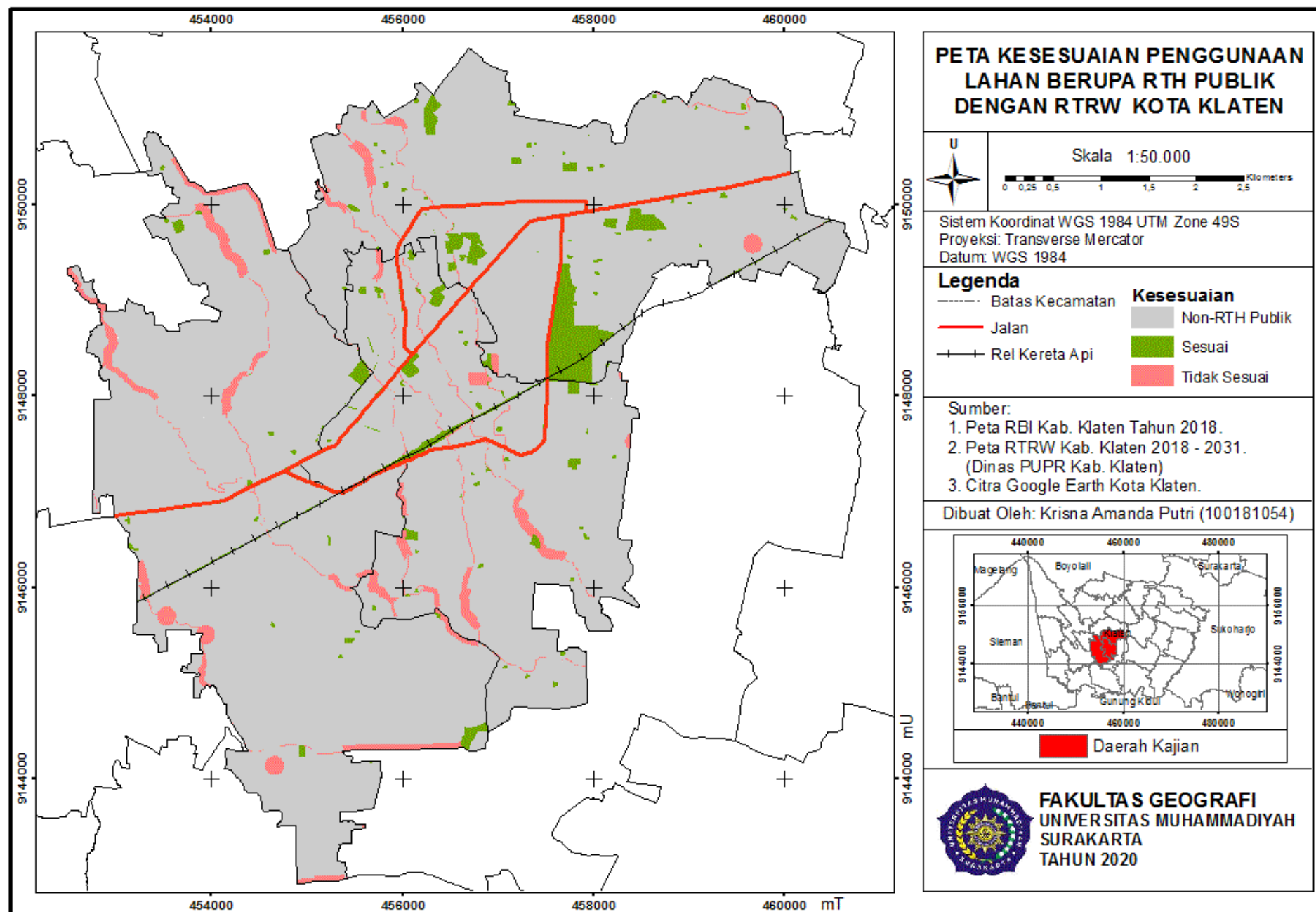
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di suatu wilayah telah diatur dalam Permen PU nomor 5 tahun 2008, yaitu luas RTH privat minimal adalah 10% dan RTH Publik 20% dari total luas wilayahnya. Berdasarkan PerGub Jawa Tengah nomor 60 tahun 2014 Kota Klaten seharusnya memiliki luas RTH Privat minimal sebesar 20% dari total luas wilayahnya. Menghitung ketersediaan RTH Publik di Kota Klaten dilakukan dengan menggunakan peta hasil digitasi RTH Publik yang telah dimiliki kemudian dilakukan perhitungan menggunakan *tool calculate geometry* pada *software ArcGis* dalam satuan luas hektar.

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan diketahui bahwa secara keseluruhan Kota Klaten telah memiliki RTH publik dengan luas 77,892 Ha. Kota Klaten yang terdiri dari tiga kecamatan memiliki luas area sebesar 3574,050 Ha, dengan luas RTH publik 77,892 Ha berarti baru memiliki $\pm 2,19\%$ RTH publik secara keseluruhan. Jumlah ini masih sangat jauh dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 20% dari total luas wilayah yang ada.

Ruang terbuka hijau (RTH) Publik di Kota Klaten juga diatur keberadaannya dalam RTRW Kota Klaten Tahun 2018. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun sebagai acuan dalam pembangunan agar mencapai pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan. RTRW Kota Klaten di dalamnya mengatur baik lokasi maupun luas area yang difungsikan sebagai RTH Publik. Berdasarkan peta RTRW Kota Klaten tahun 2018 diketahui bahwa ada luas lahan sebesar 276,141 Ha yang direncanakan untuk ketersediaan ruang terbuka hijau publik.

Luas lahan yang telah dimanfaatkan dengan benar untuk ketersediaan RTH Publik di Kota Klaten sebesar 77,892 Ha. Sedangkan sisa luas lahan sebesar 149,772 Ha yang telah direncanakan untuk ketersediaan RTH publik masih difungsikan untuk penggunaan lahan yang lain atau belum berfungsi sebagai RTH publik. Kesesuaian RTH Publik dengan RTRW Kota Klaten secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 3.2. Lahan yang belum sesuai fungsinya sebagai RTH saat ini masih dimanfaatkan

sebagai penggunaan lahan yang lainnya seperti permukiman serta kegiatan pertanian. Melihat data tersebut, maka perlu adanya penyuluhan, pengawasan ataupun penertiban dari pemerintah terkait kepada masyarakat agar mencapai luas RTH publik yang telah ditetapkan.



Gambar 4.17 Peta Keseuaian RTH Publik Kota Klaten.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Agihan atau persebaran ruang terbuka hijau publik di Kota Klaten dapat dikatakan menyebar diseluruh Kota Klaten. Objek RTH publik seperti jalur pejalan kaki, sempadan rel kereta api, lapangan, median jalan, serta pemakaman merupakan ruang terbuka hijau publik yang keberadaannya dapat ditemukan diseluruh Kota Klaten. Sedangkan untuk RTH publik berupa hutan kota, taman, sempadan sungai serta pulau jalan tidak dapat ditemukan diseluruh bagian Kota Klaten, melainkan hanya dibeberapa kecamatan saja.
2. Ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Klaten masih sangat kurang apabila mengacu pada permen PU yang menyatakan luas minimal RTH publik disuatu wilayah adalah 20% dari total luas wilayahnya. Secara keseluruhan Kota Klaten memiliki luas ruang terbuka hijau publik sebesar 77,892 Ha. Apabila dibandingkan dengan luas Kota Klaten yang sebesar 3574,05 Ha maka secara persentase Kota Klaten baru memiliki $\pm 2,19 \%$ RTH publik.
3. Rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kota Klaten hingga saat ini penerapan dalam hal penyediaan RTH publik masih belum maksimal. Dengan luas sebesar 3574, 05 Ha, pemerintah Kota Klaten menyediakan total lahan seluas 276, 141 Ha untuk ketersediaan ruang terbuka hijau publik. Namun, hingga saat ini baru 77, 892 Ha luas lahan yang telah dimanfaatkan sebagai RTH publik. Sedangkan sisa luas lahan sebesar 149, 772 Ha yang telah direncanakan untuk ketersediaan RTH publik masih di fungsikan untuk penggunaan lahan yang lain atau belum berfungsi sebagai RTH publik. Hasil analisis keterkaitan ketersediaan RTH publik dengan jumlah penduduknya diketahui bahwa hanya RTH publik berupa pemakaman dan RTH berupa taman kota saja yang sudah memenuhi ketersediaannya, sedangkan jenis RTH publik yang lainnya seperti RTH publik fungsi tertentu yang secara luas perkapita masih kurang sebesar $9,6 \text{ 90 m}^2$ /kapita, RTH publik berupa hutan kota yang masih kurang sebesar $3,38 \text{ 90 m}^2$ /kapita, serta RTH berupa taman kelurahan yang masih kurang $0,14 \text{ 90 m}^2$

/kapita. Melihat hasil diatas, dapat dikatakan bahwa analisis keterkaitan RTH publik sebaiknya dihubungkan dengan jumlah penduduk bukan luas area agar lebih representatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini RTRW yang digunakan adalah RTRW kabupaten bukan Kota sehingga ukuran luasnya tidak akan sesuai.

4.1 Saran

1. Citra yang digunakan sebaiknya menggunakan tahun perekaman yang lebih terkini atau dekat dengan waktu penelitian serta resolusi spasial yang lebih baik, sehingga hasil interpretasi memiliki nilai akurasi lebih tinggi.
2. Perlu adanya sosialisasi serta pengawasan terhadap jalannya pembangunan di Kota Klaten oleh pemerintah terkait.
3. Analisis keterkaitan RTH publik sebaiknya di bandingkan dengan jumlah penduduk agar lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

Badan Pusat Statistik. (2018). Klaten Dalam Angka 2018. Klaten: Badan Pusat Statistik.

Prahasta, Eddy. 2005. Sistem Informasi Geografis : Konsep-konsep Dasar. Penerbit Informatika Bandung.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai pengendalian Ruang Terbuka Hijau